

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 579-584

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15717987>

Analisis Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Saskia Apriliani, Muhaimin Yahya, Moch Fahmi Maulana Idris, Hifa Latifatul Ulfah, Dzaki Azmi, Asep Nursholeh, Lazuardi Kautsar Ilmi

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: saskiaapriliani2@gmail.com, ymoch.mien02@gmail.com, fahmi100205@gmail.com,
hifatifatululfah@gmail.com, dzakiazmi09@gmail.com, asepnusoleh1909@gmail.com,
lazuardi.kautsar12@gmail.com, diaherdiana@uinsgd.ac.id

Abstract

Poverty is a social problem that is often faced by all humans, especially people in Indonesia and is often associated with economic aspects, especially the level of community income. This problem is considered crucial because it has a direct impact on daily life, so its handling is very important to pay attention to. This study aims to understand how the process carried out by the government in Indonesia in overcoming poverty. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that there has been development in efforts to reduce poverty from the New Order era to the leadership of President Joko Widodo. This process is carried out through the implementation of regulations based on the values of the 1945 Constitution and Pancasila. In formulating policies, the government must consider their long-term impacts. In addition, public policy is an important instrument in monitoring and evaluating the development of poverty levels in Indonesia. Through the policies that have been implemented, it is hoped that the poverty rate can continue to decline. On the other hand, the education factor is also one of the main causes of poverty. The low level of community education contributes to unstable economic conditions. Therefore, the government also focuses its attention on education programs to encourage the progress and welfare of the nation.

Keywords: Poverty, Social Problems, Education

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh seluruh manusia khususnya masyarakat di Indonesia dan sering dihubungkan dengan aspek ekonomi, khususnya tingkat pendapatan masyarakat. Masalah ini dianggap krusial karena berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga penanganannya sangat penting untuk diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan dalam upaya mengurangi kemiskinan dari masa Orde Baru sampai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Proses tersebut dilakukan melalui penerapan regulasi yang berlandaskan pada nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, kebijakan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun. Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berkontribusi terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah turut memfokuskan perhatiannya pada program-program pendidikan guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Kata Kunci : Kemiskinan, Masalah Sosial, Pendidikan

Article Info

Received date: 26 May 2025

Revised date: 18 Juni 2025

Accepted date: 23 June 2025

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan isu strategis dalam tata kelola negara karena secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat dan erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan. Sepanjang

sejarah umat manusia, kemiskinan telah menjadi persoalan kompleks yang terus relevan di berbagai belahan dunia. Walaupun sering diidentikkan dengan rendahnya pendapatan, kemiskinan sesungguhnya mencakup berbagai aspek lain seperti kesehatan dan pendidikan. Menurut definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kemiskinan diartikan sebagai suatu situasi seseorang yang tidak mempunyai akses atau peluang untuk mengembangkan potensi hidupnya. Artinya, kemiskinan mencerminkan kegagalan dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.

Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan penguasaan teknologi menjadi penghambat yang krusial dalam pengembangan sumber daya manusia dan turut memperparah kemiskinan. Di samping itu, hambatan struktural, kelembagaan, serta nilai-nilai sosial dan budaya juga berperan dalam mempertahankan kondisi kemiskinan. Mengesampingkan aspek kemanusiaan dalam upaya pengentasan kemiskinan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, pemberdayaan manusia menjadi ukuran yang esensial bagi kemakmuran suatu negara, yang indikatornya tidak selalu berdasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi mencakup aspek kehidupan dan tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan pengetahuan menjadi salah satu komponennya. Melalui sistem pendidikan yang baik, diharapkan mampu mendorong terlaksananya pembangunan kualitas sumber daya manusia secara optimal.

Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs), yang menitikberatkan pada lima pilar utama: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2030 mencakup tiga tujuan besar, yaitu penghapusan kemiskinan, penciptaan keseimbangan antara sektor ekonomi dan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup.

Sesuai amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi fakir miskin serta anak-anak yang terlantar. pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya menurunkan tingkat kemiskinan sejak masa Orde Lama hingga pemerintahan sekarang. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan tercatat mencapai 28,01 juta orang, atau sekitar 10,86% dari total populasi sekitar 250 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih tinggi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan.. Bahkan, pada Maret 2016, tercatat kenaikan sebesar 0,02% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, dengan angka kemiskinan di pedesaan mencapai 14,11%. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Melihat kondisi tersebut, penulis terdorong untuk menelaah kebijakan-kebijakan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Indonesia, mulai masa era Orde Lama hingga masa pemerintahan saat ini.

METODE PENELITIAN :

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada deskripsi serta menyoroti proses yang dianalisis secara induktif. Keunggulan metode kualitatif terletak pada kemampuannya dalam menyajikan gambaran yang mendalam dan terperinci. Pendekatan ini juga dimanfaatkan untuk menggali fenomena secara lebih menyeluruh guna menangkap makna yang tersirat dalam kajian artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN :

1. Kemiskinan

Chambers menyatakan bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks yang mencakup lima dimensi: kondisi miskin, kelemahan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan. Kemiskinan tidak hanya soal kurangnya uang, tapi juga terkait dengan rendahnya kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, serta keterbatasan dalam menentukan nasib sendiri.

Ukuran kemiskinan dilihat dari konsumsi beras:

- a. Di kota, dikatakan miskin jika konsumsi beras kurang dari 420 kg/tahun.

- b. Di desa, dikatakan miskin jika kurang dari 320 kg, sangat miskin jika di bawah 240 kg, dan paling miskin bila di bawah 180 kg per tahun.

2. Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Kuncoro (mengutip Sharp, 1996), penyebab kemiskinan meliputi:

- a. Ketimpangan kepemilikan sumber daya (tingkat mikro);
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- c. Masalah ekonomi makro seperti inflasi, krisis, dan kebijakan yang tidak merata.¹

Menurut Ginandjar, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kesehatan yang kurang baik, sedikitnya lapangan pekerjaan, dan keterpencilan wilayah. Bank Dunia juga mencatat lima faktor utama penyebab kemiskinan: pendidikan, pekerjaan, gender, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kondisi geografis (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Letak geografis suatu wilayah sangat berpengaruh karena berkaitan dengan potensi alam dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Wilayah terpencil, khususnya di Indonesia timur, sering kekurangan akses pendidikan dan layanan dasar.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas saling berkaitan sehingga membentuk siklus kemiskinan. Keluarga miskin yang berada di pedesaan umumnya berpendidikan rendah dan berpendapatan minim, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dan cenderung mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya (Fitriana & Qibthiyyah, 2021).²

3. Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Orde Lama

Upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah sudah dimulai sejak era Orde Lama, terutama pada dekade 1960-an. Program utamanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Nasional Delapan Tahun (Penasbede). Mengacu pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 yang berisi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan nasional terpadu pada tahap pertama (1961–1969), tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan pendapatan nasional guna mewujudkan kemakmuran masyarakat. Untuk mencapai hal ini, negara mendorong kemandirian ekonomi melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, dan kesehatan. Peningkatan pendapatan, baik pada tingkat nasional maupun rumah tangga, menjadi agenda berkelanjutan, seiring dengan upaya menyeluruh dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan jangka panjang tersebut (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Namun, meskipun pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan kemiskinan, implementasinya terganggu oleh krisis politik pada tahun 1965, yang justru memperburuk kondisi kemiskinan dan meningkatkan jumlah warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi (R, 2018).³

4. Kemiskinan di Indonesia Pada Masa Orde Baru

a. Tahun 1974–1988

Pada periode ini, pemerintah menjalankan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I sampai IV dengan pendekatan sektoral dan regional. Program sektoral diarahkan pada peningkatan produksi dan pembangunan infrastruktur sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pakaian, makanan, serta layanan kesehatan. Di sisi lain, program tingkat regional difokuskan pada penggalan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal (Saryana, 2020). Penjelasan lebih rinci:

¹ Barika, Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). Analisis Struktur Ekonomi Di Sumatera. Provincial Government, Indonesia. Murdiyana, & Mulyana. (2017).

² PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 4 Nomor 2.

Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Politik Pemerintahan , 73-96.

³ Fitriana, N. E., & Qibthiyyah, R. M. (2021). Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Jumlah

- Program sektoral bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian target pada sektor-sektor tertentu. Program ini disesuaikan dengan potensi daerah dan dibiayai oleh APBN serta dilaksanakan oleh instansi pemerintah terkait.
- Program regional (atau lokal) berperan dalam memperkuat integrasi wilayah dan mempercepat pembangunan daerah dengan pendekatan berbasis potensi serta kebutuhan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah (Rosyadi & Tobirin, 2010).

Selain itu, Program Inpres diluncurkan dengan beberapa tujuan utama: memperluas distribusi hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, serta mendorong pembangunan yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat (Sumiar, 2019).

b. Tahun 1988–1998

Dalam pelaksanaan Repelita V dan VI, pemerintah menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan yang menggabungkan pendekatan sektoral dan regional secara sinergis. Penanganan ketimpangan sosial dan ekonomi diperkuat melalui Keppres No. 3 Tahun 1993, yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program, termasuk Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Program IDT, yang diluncurkan lewat Keppres No. 5 Tahun 1993, bertujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di sekitar 20.000 desa tertinggal. Setiap desa menerima dana sebesar Rp20 juta per tahun. IDT berfungsi sebagai pemicu gerakan nasional untuk pengentasan kemiskinan, sebagai langkah awal pemberdayaan masyarakat desa, dan sebagai bentuk dana bergulir bagi kelompok miskin. Program ini menekankan semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berbasis potensi lokal.

Sebagai pelengkap IDT, pemerintah juga meluncurkan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) pada tahun 1995. P3DT berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar dan sarana sosial-ekonomi untuk mendukung kegiatan masyarakat di desa. Tujuan jangka panjangnya adalah memberdayakan masyarakat desa agar mampu terlibat aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan program ini menjadi bagian penting dari gerakan nasional pengurangan kemiskinan yang berkeadilan, termasuk pengembangan lebih lanjut seperti Program Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT) pada masa Repelita VI (Sumiar, 2019).

c. Tahun 1998–2007

Setelah krisis ekonomi tahun 1997/1998, pemerintah melanjutkan program pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya pemulihan. Menurut BPS, sekitar tahun 1998 jumlah penduduk yang miskin melonjak hingga 49,5 juta jiwa (24,2% dari total populasi). Melalui pengendalian harga dan peningkatan daya beli, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 36,1 juta jiwa (16,6%) pada tahun 2004. Dari jumlah ini, sekitar 12,6% tinggal di perkotaan dan 19,5% di pedesaan.

Sebagai langkah strategis, pemerintah menerbitkan Keppres No. 124 Tahun 2001 yang menetapkan pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sebagai forum koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pengentasan kemiskinan. Untuk memperkuat komite tersebut, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 54 Tahun 2005 untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang tugasnya mempercepat penanganan kemiskinan secara nasional (Handoyo, Anas, & Yudianto, 2019).

d. Masa Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, strategi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada empat aspek utama (Barika et al., 2021):

- (1) Program perlindungan sosial berkelanjutan,
- (2) Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar,
- (3) Pemberdayaan masyarakat miskin, dan

(4) Pembangunan yang bersifat inklusif.

Sebagai bentuk konkret dari strategi ini, pemerintah meluncurkan beberapa program unggulan, sebagai berikut:

- (1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera,
- (2) Program Indonesia Pintar, dan
- (3) Program Indonesia Sehat.

Ketiga program ini dirancang untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan memberikan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.⁴

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik pada Semester Genap Tahun Pembelajaran 2024/2025 yang telah memberi dukungan material terhadap penyusunan artikel ini, serta kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dari awal sampai dengan akhir penyusunan artikel sesuai dengan rencana. Juga tidak lupa kami ucapkan kepada bapak dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Ekonomi Publik Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP. M.Ap yang telah membimbing kami dalam penyusunan artikel jurnal ini dengan dedikasi terbaik hingga kami dapat menuntaskannya.

SIMPULAN

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah kompleks yang tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sejak Orde Lama hingga pemerintahan Jokowi, berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari pembangunan kebutuhan dasar hingga program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pembangunan terus berfokus pada perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan SDGs. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan strategi jangka panjang yang menyeluruh, kolaboratif, dan berkeadilan.

Kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam strategi penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan. Program-program yang dijalankan sejauh ini telah menunjukkan efektivitasnya, dengan inovasi kebijakan yang terus diperbarui di setiap masa pemerintahan. Seluruh upaya tersebut telah dituangkan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Sejak masa Orde Lama hingga era pemerintahan Joko Widodo, kebijakan pengentasan kemiskinan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang tercantum dalam UUD 1945 serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang diambil bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

REFERENSI

- Barika, Ekaputri, R. A., Septriani, & Efendi. (2021). Analisis Struktur Ekonomi Di Sumatera. PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 4 Nomor 2. <http://dx.doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Fitriana, N. E., & Qibthiyyah, R. M. (2021). PENGARUH KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN PEDESAAN DI INDONESIA. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, 8(1), 19–44. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v8i1.21120>
- Handoyo, S., Anas, S., & Yudianto, I. (2019). Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government, Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 23(1), 33. <https://doi.org/10.22146/jkap.37046>
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>

⁴ Penduduk Miskin Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia.

Handoyo, S., Anas, S., & Yudianto, I. (2019). Analysis of the Financial Condition West Java

- R, F. F. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 66-79.
- Rosyadi, S., & Tobirin. (2010). Perumusan Kebijakan Publik dalam Menggali Akar Kemiskinan. 115-125.
- Sabani, I. A. (2018). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendidikan Boarding School SMK Negeri 3 Di Kabupaten Purbalingga.
- Saryana. (2020). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sumiar, H. R. (2019). Back Matter JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 23(1). <https://doi.org/10.22146/jkap.46696>
- Volume 10 Nomor 1 (2017) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. (n.d.). <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1>